

INDEKS PENULIS

Jilid 44 No.1, Januari 2015

Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia Beatrix Benni	1 - 10
Normativitas Keilmuan Hukum dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-kantian FX. Adji Samekto	11 - 17
Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi Rochmani	18 - 25
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Sunaryo	26 - 33
Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Etty Susilowati	34 - 43
Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan dalam Gerakan Anti Korupsi di Kalimantan Barat Purwanto	44 - 51
Faktor Kriminogen Illegal Mining Timah di Bangka Belitung Dwi Haryadi	52 - 58
<i>Justifikasi Doktrin Responsibility To Protect (RToP)</i> dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila Sasmini	59 - 68
Sandera Pajak sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Utang Pajak (Studi tentang Penegakan Hukum Pajak melalui Sandera Pajak) Budi Ispriyarso	69 - 77
Ilmu Hukum Nasional dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Berasaskan Keadilan Sosial Derita Prapti Rahayu	78 - 84
Praktik Pengawasan Raperda dan Perda serta Upaya Rekonstruksi Pengujiannya Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 Umbu Rauta	85 - 97
Kewenangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Fadly Afand Djafar	98 - 103
Analisis Asas Keadilan pada Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam Islamiyati	104 - 112

INDEKS PENULIS

Kajian terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif Kajian terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi 114 - 122
Krismiyarsi

Jilid 44 No.2, April 2015

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 123 - 129
Ery Agus Priyono

Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan 130 - 139
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Alokasi , Distribusi Zakat dan Dana Tanggung Jawab Sosial di Perbankan Syariah 140 - 149
Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah

Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 150 - 160
Nur Rochaeti

Perolehan dan Hak Waris Bagi Istri Kedua, Ketiga, dan Kempat 161 - 168
Didi Sukardi

Rekonsiliasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Perspektif Hukum Agama 169 - 177
Suparmin

Penerapan Metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah 178 - 189
Rahmad Satria

Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur 190 - 199
Ani Purwanti

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang) 200 - 207
Nixon G. L. Osingmahi

Tanggung Jawab Negara untuk Menerima Bantuan Kemanusiaan saat Tanggapan Darurat Bencana Alam 208 - 215
Natalia Yeti Puspita, SH.M.Hum

Dekonstruksi Stelsel Absorpsi dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif 216 - 223
Tongat

INDEKS PENULIS

- Merekonstruksi Sistem Hukum Administrasi Menuju Hukum Yang Melayani** 224 - 233
Sri Nur Hari Susanto
- Mutasi Pejabat Fungsional Ke dalam Jabatan Struktural di Era Otonomi Daerah** 234 - 242
Nelson Bastian Nope
- Analisis Penerapan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati** 243 - 252
S. Endang Prasetyawati
- Jilid 44 No.3, Juli 2015**
- Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Perilaku Diskriminatif di Kota Semarang** 253 - 264
Lita Tyesta ALW
- Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan: Menjaga Keutuhan dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia** 265 - 274
Tundjung Herning Sitabuana
- Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat** 275 - 283
didiek R. Mawardi
- Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** 284 - 296
Henny Juliany
- Kewenangan Konstitusional Presiden terhadap “ Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa”** 297 - 304
Siti Marwiyah
- Orang Asing sebagai Subjek Hak Atas Tanah di Indonesia** 305 - 315
FX. Sumarja
- Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi** 316 - 325
Antonius Sudirman
- Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat** 326 - 335
Sukirno
- Pergeseran Politik Hukum Koperasi dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 dan UU RI No. 17 Tahun 2012 Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU RI -XI/2013** 336 - 347
Tri Budiyono dan Christina Maya Indah S
- Tinjauan atas Kebutuhan LP Khusus Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Indonesia** 348 - 355
F.H. Edy Nugroho

INDEKS PENULIS

- Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Tahun 186 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** 356 - 363
JIS. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Kartika Widya Utama
- Membangun Legal Basis Pengisian Jabatan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** 364 - 371
Retno Mawarini Sukmariningsih
- Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda** 372 - 386
La Sina
- Penelitian Ilmiah Batas Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982** 387 - 392
Tommy Hendra Purwaka
- Jilid 44 No. 4, Oktober 2015**
- Implikasi Sistem Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Nilai Pancasila** 393 - 404
Ratna Herawati
- Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik untuk Kemakmuran** 405 - 414
Aktris Nuryanti
- Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia** 415 - 424
Widayati
- Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah ada Uu No. 30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** 425 - 430
Aju Putrijanti
- Hakekat Hukum Pengupahan dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pekerja** 431 - 446
H. Zulkarnain Ibrahim
- Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris** 447 - 453
Yulies Tiena Masriani, Haryati, Dan Siti Mariyam
- Perspektif Agama-Agama di Indonesia terhadap Pluralisme Agama** 454 - 461
Marsudi Utoyo
- Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkat Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia** 462 - 472
Darminto Hartono
- Status Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional** 473 - 483
Nurul Huda
- IV**

INDEKS PENULIS

Pola Harmonisasi Budaya dalam Sistem Komunikasi Hukum sebagai Usaha Penegakan Hukum Fitriati	484 - 492
Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan	493 - 502
Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana Shinta Agustina	503 - 510
Kekuatan Mengikat Putusan <i>Constitutional Review</i> Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung Rian Van Frits Kapitan	511 - 520
Dampak Politik Hukum Pertanahan yang Belum Berperspektif HAM bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung Candra Perbawati	521 - 531

INDEKS SUBJEK

A

Affirmative Action, 189, 190, 192,
Agama 454, 455, 456
Asas Keadilan Sosial, 78, 81
Asas Keadilan, 81, 104, 109
Asas Kebebasan Berkontrak, 123, 124, 128

B

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), 245, 246, 247,
Bank Syariah, 140, 143
Batas Laut, 386, 387, 388, 389
Budaya Tradisional, 34, 35

C

Cita Hukum 431, 432, 436
Corporate Social Responsibility, 26, 27

D

Disabilitas: 252, 253, 254, 255,
Diskriminasi 493, 495, 501
Diskriminatif, 252
Diversi, 150
Doktrin, 130
DPD, 397, 399, 400
DPR 420,421,422

F

Filsafat Hukum, 161
Fungsi Hukum, 274, 275.

G

Gerakan Anti Korupsi, 44, 47

H

Hak Asasi Manusia, 18, 19, 25
Hak Atas Tanah, 304, 305, 306, 307
Hak Kekayaan Intelektual, 34, 35
Hak Menguasai Negara, 130, 132
HAM 473, 474, 475
Harmonisasi Budaya 489, 490, 491
Hukum Administrasi Negara (HAN), 227, 232
Hukum Administrasi, 224, 225
Hukum Islam, 104, 116
Hukum Kewarisan Islam, 112, 161, 164
Hukum Pengupahan 431, 433, 444.
Hukum Pidana, 245, 246, 247
Hukum Waris Adat, 2, 9
Hukum Waris Barat, 2, 9
Hukum Waris, 1, 110

INDEKS SUBJEK

I

Illegal Mining, 52, 54
Ilmu Hukum Empirik, 114, 115
Ilmu Hukum Nasional, 78, 79
Ilmu Hukum Normatif, 114, 115

J

Jabatan Fungsional, 234, 236, 241
Jabatan Struktural, 234, 238, 241

K

Keadilan Restoratif, 150, 154
Keadilan Substantif, 216, 219
Kebijakan Afirmasi, 325, 326, 327, 328.
Kedaulatan Negara, 209
Kedaulatan: 264, 266, 268, 269, 270, 271
Kejahatan Konservasi, 243, 247, 248
Kekayaan Negara, 283, 284, 285, 287,
Kelembagaan Perempuan, 44, 47
Kewenangan, 425, 426, 427
Kewenangan Daerah, 85, 86, 92, 98, 99
Komnas HAM, 257
Kompetensi Peradilan, 355, 356,
Komunikasi Hukum 484, 485, 486
Koperasi, 335, 336, 337, 337
Korupsi, 315, 316, 317, 318,
Kriminogen, 52, 53, 55

L

Lembaga Legislatif, 90, 189
Lembaga Masyarakat 347, 348, 350,
Lembaga Pemerintah 465, 468, 469
Lex Spesialis Derogat Legi Generali 506, 507, 509

M

Mahkamah Agung 511, 516, 517
Mahkamah Konstitusi 512, 513, 514
Majelis Pengawasan Notaris 448, 450, 452
Masyarakat Hukum Adat 521, 528, 529
Masyarakat Hukum adat, 325, 326, 327, 328.

N

Narapidana, 347, 348, 350,
Negara Hukum Kesejahteraan, 130
Neo-kantian, 11, 13
Normativitas, 11, 12
Notaris 447, 448, 449

P

Pancasila, 252, 393, 394, 401
Pelanggaran HAM, 169

INDEKS SUBJEK

Pembagian Harta Warisan, 104, 112
Pembangunan Berkelanjutan, 26, 28
Pendaftaran Tanah, 200
Penegakan Hukum 496, 497, 498
Penegakan Hukum, 371, 372, 375.
Penegakan Hukum, 69, 71
Pengaturan Mutasi, 234
Penyandang Disabilitas, 252, 253, 257
Penyanderaan Pajak, 69, 70
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 425, 426, 430
Peraturan Gubernur 522, 528, 530
Perbarengan Tindak Pidana, 216, 217
Perda, 85, 89
Perjanjian Franchise, 123
Perlindungan : 252, 253, 258, 259
Perlindungan Hak Asasi Manusia, 209
Pidana Minimum Khusus, 315, 316
Pluralisme 454, 455, 456
Politik hukum, 335, 236, 336, 337
Presiden, 295, 296, 298, 299

R

Raperda, 85, 89
Regulasi Daerah, 178
Regulatory Impact Assessment (RIA), 178, 179, 181,
Rekonsiliasi, 169
Rekonstruksi, 224
Rekonstruksi, 44,89
Responsibility to Protect (RtoP), 59, 61
Sumber Daya Genetik (SDG), 405, 407, 408
Sertifikat Hak Milik Tanah, 200, 202
Sistem Peradilan Pidana Anak, 150, 151
Stelsel Pidana, 216, 221
Subjek Hak : 304, 305, 306, 307
Sumber Daya Alam Hayati, 243
Surat Dakwaan 505, 506, 507

T

Tanggung Jawab Negara, 208, 210
Tanggung Jawab Negara, 209
Tanggung Jawab Sosial, 140
Transsendental Idealis, 11,

U

UMKM 462, 463, 464
Undang-Undang Dasar 1945,419,422, 423
UUPH 474, 479, 480

W

Wajib Pajak, 69, 70, 72, 74, 75, 76

UCAPAN TERIMAKASIH

Seluruh pengelola jurnal Masalah Masalah Hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kontribusi Mitra Bebestari yang telah melakukan penelaahan terhadap jurnal Masalah Masalah Hukum Jilid 44 Tahun 2015, kepada :

1. Dr. Shidarta, SH, MH. (Bina Nusantara)
2. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, SH, MA. (Universitas Indonesia)
3. Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA. (Universitas Andalas)
4. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, MH. (Universitas Gadjah Mada)
5. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH. (Universitas Sebelas Maret)
6. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD. (Universitas Indonesia)
7. Dr. Ni'matul Huda, SH, MHum. (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
8. Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, SH, MA. (Universitas Airlangga)
9. Prof. Dr. I. G. A. Ketut Rachmi Handayani, SH, MM. (Universitas Sebelas Maret)